

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2014 – 2018

Yogi Kharisma Finky Rahayu <sup>1)</sup>  
Aris Eddy Sarwono <sup>2)</sup>  
Sunarti <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: <sup>1)</sup> yogikharisma18@gmail.com

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the level of independence, effectiveness, efficiency, growth and analyze the financial performance of the Ngawi Regency government when compared to other regencies in East Java Province. This research was conducted at the local government of Ngawi Regency. The type of data used is secondary data. The results of this study address the financial independence ratio of 10.57% included in the very low category with an instructive relationship pattern. The effectiveness ratio of 138.46% is included in the very effective category. The efficiency ratio of 100.00% is included in the less efficient category. The growth ratio of 01.06% falls into the very low category. The overall financial performance of the Ngawi Regency government can be said to be moderate because it is not in the good or bad category when compared to the Regencies and Cities in East Java Province.*

**Keywords:** *Financial Ratio, Financial Performance, Local Government*

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab secara berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Undang-undang otonomi merupakan wujud pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah. Pada era otonomi daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. (Halim, 2007: 220) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Kemampuan pemerintah daerah perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolok ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis

laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2007: 128).

Laporan keuangan merupakan suatu alat akuntabilitas utama pemerintah yang digunakan dan difungsikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti: investor, kreditor, maupun masyarakat luas. Lembaga keuangan pusat mengadaptasi dan memanfaatkan sistem akuntabilitas keuangan untuk mengontrol keuangan (Kelly dan John, 2000). Menurut Kluvers (2010), akuntabilitas merupakan suatu bentuk kegiatan dalam hal pengungkapan serta pertanggungjawaban laporan keuangan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan laporan APBN/APBD tersebut, pihak parlemen, investor, kreditor, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dapat dengan mudah menilai kinerja pemerintah tersebut. Namun, harus diakui bahwa di negara Indonesia laporan keuangan maupun anggaran sektor publik belum dipandang memiliki dimensi politik dan manajerial yang strategis bagi pemerintah untuk menjual program walaupun parlemen dan rakyat memantau dan mengamati kinerja pemerintah (Harun, 2009: 53).

Kinerja keuangan pemerintah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga organisasi yang bersifat komersial. Adapun manfaat dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah adalah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dipergunakan sebagai acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan juga pendapatan daerahnya pada periode-periode selanjutnya (Kurniati, 2012: 251). Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dan mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam PAD.

Pada tahun 2015 Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LKKL) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini 78,42 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2014 yakni 74,42 persen, LKKL mendapat opini WTP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan 86 laporan keuangan lembaga, 61 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 7 sisanya tidak diberikan opini tidak memberikan pendapat. Namun BPK baru menerima 504 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harusnya 524 LKPD. Menurut Ketua BPK dilihat dari data BPK, pemberian opini WTP pada LKPD meningkat 164 persen dari 95 opini WTP ditahun berikutnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap 34 provinsi, 379 laporan keuangan pemerintah kabupaten dan 91 pemerintah kota (<http://www.cnnindonesia>).

Ngawi merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan WTP 6 kali berturut-turut sejak tahun 2013 karena kinerja pemerintah kabupaten tidak menurun, selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Lantaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan sejumlah optimalisasi. Seperti proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Peneliti melakukan penelitian dikarenakan pertumbuhan ekonomi antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota tidak merata. Pengelolaan pendapatan Asli Daerah setiap wilayahpun berbeda-beda. Pemerintah daerah cenderung memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam membangun sarana dan prasarana ([radarmadiun.co.id](http://radarmadiun.co.id)).

Peneliti terdahulu menyebutkan bahwa terdapat beberapa masalah mengenai kinerja keuangan antara lain penelitian yang pernah dilakukan Rahmawati dan Putra (2016) menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah

sekali. Rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif. Rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien. Rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tingkat proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 tergolong ekonomis.

Hasil penelitian Lubis dan Hafni (2017) menunjukkan hasil bahwa adanya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013 dalam kategori rendah. Efektivitas keuangan daerah dalam kategori sangat efektif di tahun 2011-2012 dan tidak efektif di tahun 2013. Efisiensi keuangan daerah berada pada kategori sangat efisien. Pertumbuhan pendapatan daerah cenderung menurun dan negatif di tahun 2013, Pemkab Labuhan Batu memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman karena memiliki *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) di atas 250% setiap tahunnya.

Penelitian Nurhayati (2015) menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Efektivitas keuangan Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan pendapatan daerah memiliki kecenderungan sangat efektif. Rasio efisiensi Kabupaten Rokan Hulu memiliki kecenderungan cukup efisien. Rasio pertumbuhan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2009 dengan kategori tidak baik, pada tahun 2010 dengan kategori cukup baik, pada tahun 2011-2012 memiliki kategori baik. Tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan kategori tidak efektif.

Liantino (2018) hasil analisis menunjukan bahwa Kinerja Keuangan BPPKAD Kota Surakarta dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dianggap tinggi yang termasuk dalam pola delegatif. Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kota Surakarta termasuk dalam kategori belum efektif. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinyatakan tidak efisien sehingga. Rasio Aktifitas/rasio keserasian dianggap cukup baik, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam melakukan kegiatan kebutuhan pembangunan daerah tersebut. Rasio Pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan sehingga membuat kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Kota Surakarta.

Tujuan dalam penelitian ini untuk: a) kinerja keuangan Kabupaten Ngawi dilihat dari rasio kemandirian. b) kinerja keuangan Kabupaten Ngawi dilihat dari rasio efektivitas. c) kinerja keuangan Kabupaten Ngawi dilihat dari rasio efisiensi. d) kinerja keuangan Kabupaten Ngawi dilihat dari rasio pertumbuhan. e) Kinerja keuangan Kabupaten Ngawi dilihat dari perbandingan dengan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur.

## **LANDASAN TEORI**

### ***Teory Signalling* (Teori Sinyal)**

Teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan amanah dalam membangun negara kearah yang lebih maju ke depan, memberikan signal yang baik kepada masyarakat. Realisasinya yaitu dengan cara menyajikan laporan keuangan yang akurat, penyampaian informasi kinerja pemerintah, peningkatan pelayanan masyarakat, pengemasan prestasi dan kinerja keuangan yang simpel dan menarik dibaca oleh pengguna (Hilmi dan Martini, 2012: 96).

Pengungkapan informasi keuangan yang disajikan secara lengkap menunjukkan inisiatif bagi pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan pemerintah akan berujung balasan signal yang baik dari masyarakat yang mendukung pemerintah untuk berkembang dan optimal dalam membangun negara. Publikasi laporan keuangan melalui internet merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang dianggap paling efisien, cepat

dan murah. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat salah satunya laporan keuangan, tidak semua pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di *website* yang telah tersedia.

### Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonomi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah.

### Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio maka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan dana perimbangan atau data transfer.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat ditampilkan dalam Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi *riil* daerah. Pola hubungan, Tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

### Rasio Efektivitas

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara

membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan dengan indikator sebagai berikut:

**Tabel 2. Kategori Efektivitas Keuangan Daerah**

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup efektif
60 – 80	Kurang efektif
< 60	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup. Meskipun dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD.

### Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di laporan realisasi anggaran, yaitu data tentang pemungutan PAD. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Secara umum nilai indikator efisiensi PAD sebagai berikut:

**Tabel 3. Kriteria Efisien Kinerja Keuangan**

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Tidak efisien
90 – 100	Kurang efisien
80 – 90	Cukup efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah keadaan tumbuh atau perkembangan (Halim, 2004: 291). Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010: 138).

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD } X_n - (X_{n-1})}{\text{Realisasi PAD } X_{n-1}} \times 100 \%$$

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Keterangan:

$X_n$  = Tahun yang dihitung

$X_{n-1}$  – Tahun sebelumnya

Untuk menilai tingkat pertumbuhan Keuangan daerah Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. Kriteria Tingkat Pertumbuhan**

Kriteria	Tingkat Pertumbuhan (%)
Sangat rendah	0 – 10
Rendah	11 – 20
Sedang	21 – 30
Tinggi	Di atas 40

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan berbentuk deskriptif komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu fakta dan menggambarkan fenomena secara mendetail. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dengan data sekunder yang diperoleh dari website *www.bps.go.id* dan *www.djpk.go.id*.

## HASIL PENELITIAN

Hasil perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pemerintah daerah kabupaten Ngawi tahun anggaran 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi**

No	Rasio Keuangan	Tahun (%)					Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kemandirian	10,04	9,99	9,89	13,80	9,15	10,57
2	Efektivitas	168,00	138,00	121,00	165,29	100,00	138,46
3	Efisiensi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Pertumbuhan	94,34	12,95	2,32	-74,65	-34,43	0,106

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2019

Tabel 5 menunjukkan bahwa tabel rasio kemandirian Kabupaten Ngawi mendapatkan hasil yang tidak baik. Besaran rasio Kabupaten Ngawi yaitu 10,57%. Hasil ini menjadikan Kabupaten Ngawi mendapat kategori rendah sekali dengan pola intruktif yang artinya pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Kabupaten Ngawi memiliki tingkat efektivitas dengan rasio rata-rata 138,463%. Hasil ini masih menjadikan Kabupaten Ngawi dalam kategori sangat efektif.

Kabupaten Ngawi memiliki tingkat efisiensi dengan rata-rata 100%. Hasil dalam penelitian ini masuk dalam kategori kurang efisien. Rasio pertumbuhan pemerintah kabupaten Ngawi tahun 2014 sampai dengan 2018 masuk dalam kategori sangat rendah, dapat dilihat dari rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 0,106% yang artinya pemerintah Kabupaten Ngawi belum mampu meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan PAD.

## **PEMBAHASAN**

Data yang dikumpulkan berupa laporan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ngawi tahun 2014 – 2018. Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dihitung dengan rasio kemandirian masih dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif untuk tahun 2014 – 2018 dalam skala 0-25% yang artinya peranan pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian daerah itu sendiri. Pemerintah daerah belum mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan.

Tingkat Efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dalam kategori sangat efektif dengan skala > 100%. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sudah mampu merealisasikan besaran PAD yang sudah ditargetkan di awal. Pemerintah daerah dianggap sangat mampu untuk memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan.

Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi mengalami tingkat efisien yang tidak efisien (skala 90-100%). Hal itu terjadi karena realisasi pendapatan sama besarnya dengan realisasi belanja daerah. Di mana yang artinya total biaya yang dikeluarkan sangat besar untuk merealisasikan pendapatan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi belum bisa memperhitungkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi mengalami tingkat pertumbuhan dalam kategori sangat rendah (skala 0-10%). Hal ini terjadi karena PAD setiap periode selalu menurun dan hanya mengalami kenaikan sekali. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Ngawi harus mampu mengelola PAD dengan cara menggali potensi daerah misalnya di sektor pariwisata.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Secara umum dapat dikatakan baik jika dilihat dari hasil besaran rasio keuangan dibandingkan dengan seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kinerja keuangan anggaran dan belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Ngawi tahun 2014 sampai dengan 2018 secara umum dapat dikatakan baik, walaupun rasio kemandirian rendah sekali, rasio efisiensi masuk dalam kategori tidak efisien dan rasio pertumbuhan masuk dalam kategori sangat rendah.

Rasio kemandirian pemerintah kabupaten Ngawi tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan hasil rendah sekali, dapat dilihat dari rata-rata rasio kemandirian sebesar 10,57% masuk dalam pola hubungan instruktif di mana pemerintah pusat masih lebih dominan dibanding kemandirian daerah itu sendiri.

Rasio efektivitas pemerintah kabupaten Ngawi tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan hasil sangat efektif, dapat dilihat dari rata-rata rasio efektivitas rata-rata di atas 100% yaitu sebesar 138,46% yang artinya bahwa pemerintah menetapkan target sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

Rasio efisiensi pemerintah kabupaten Ngawi tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan hasil tidak efisien, dapat dilihat dari rata-rata rasio efisiensi sebesar 100,00% yang artinya Kabupaten Ngawi perlu menghitung secara benar berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatannya efisien atau tidak.

Rasio pertumbuhan pemerintah kabupaten Ngawi tahun 2014 sampai dengan 2018 masuk dalam kategori sangat rendah, dapat dilihat dari rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 0,106% yang artinya pemerintah Kabupaten Ngawi belum mampu meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan PAD. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi secara keseluruhan bisa dikatakan sedang karena tidak dalam kategori baik maupun buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Ni Luh Putu; Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.1. (2014): 211-227
- Halim, Abdul, dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kelly, Joanne and John Wanna. 2000. New Public Management and The Politics of Government Budgeting. *Journal International Public Management*, 1v(2): hal: 12-20.
- Kluvers, Ron. 2010. Mechanism of Accountability I Local Government. *International Journal of Business and Management*, 5v(7): hal: 50-58.
- Kurniati, Siti. 2012. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Liantino, Wita. 2018. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (Bppkad) di Kota Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Lubis, Putri Kemala Dewi. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013. Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol.4 No.1 Januari 2015
- Rahmawati, Ni Ketut Erna; Putra I Wayan. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.15.3. Juni (2016): 1767-1795
- <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151006072140-78-83043/bpk-sebut-kinerja-keuangan-lembaga-lebih-buruk>. Diakses pada 17 Mei 2019
- <http://radarmadiun.co.id./pembkab-ngawi-raih-opini-wtp-enam-kali>. Diakses pada 17 Mei 2019